

Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) pada Calon Pekerja Migran di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Suwanti^{*)}, Bagoes Widjanarko^{)}, Syamsulhuda Budi Musthofa^{***)}**

^{*)} Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram
Korespondensi : wanti_1205@yahoo.co.id

^{**)} Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang

^{***)} Magister Promosi Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRAK

Program pemerintah yang dikhususkan untuk para calon pekerja migran yaitu mengikuti PAP yang berisi materi wajib dan penunjang salah satunya berupa pemberian informasi dasar tentang kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penyelenggaraan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) pada calon pekerja migran di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan diskusi kelompok terarah. Informan dalam penelitian ini sebanyak 19 orang, analisa data menggunakan metode thematic content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas PAP telah memiliki pengetahuan tentang konsep PAP namun untuk pengetahuan tentang HIV/AIDS masih terbatas, sehingga sikap petugas PAP tidak menganggap penting pemberian materi HIV/AIDS pada calon pekerja migran formal. Hambatan pada pelaksanaan PAP yaitu tidak adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Materi HIV/AIDS tidak sesuai dengan modul pegangan instruktur yang disampaikan hanya dengan metode ceramah dan tidak menggunakan media pengajaran. Tidak ada kerjasama lintas sektoral dengan Dinas Kesehatan dan KPA Provinsi NTB terkait pemberian informasi HIV/AIDS pada calon pekerja migran.

Kata Kunci : pekerja migran, HIV/AIDS

ABSTRACT

The Final Departure Briefing (FDB) Implementation On The Prospective Migrant Workers In West Nusa Tenggara Province ; Government programs are devoted to the prospective migrant workers that is following the final departure briefing (FDB) which contains the compulsory and supporting material; one of them is basic information about reproductive health and HIV/AIDS. This study aims to evaluate the FDB implementation on the prospective migrant workers in West Nusa Tenggara Province. This study was qualitative research. The data collection was conducted by in-depth interview, observation and focus group discussion (FGD). Informan in this study were 19 subjects. The analysis of the data in this study used thematic content analysis method. The results of this study showed that is the official organization of the FDB implementation were the FDB officers have knowledge about FDB concept, but to knowledge about HIV/AIDS is still low, so the attitude of the FDB officers do not consider important material provision of HIV/AIDS on formal prospective migrant workers. Barriers the FDB implementation were unavailability of adequate facilities and infrastructure. HIV/AIDS materials not appropriate with the reference module of instructors which presented by lecture method and also not using the media. There's no cooperation with health authorities and AIDS Commission (KPA) in the process of FDB implementation related HIV/AIDS information to prospective migrant workers.

Keywords : migrant workers, HIV/AIDS

PENDAHULUAN

Perkembangan HIV/AIDS di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam sepuluh tahun terakhir, peningkatan AIDS sungguh mengejutkan. Pada tahun 1998 jumlah kumulatif kasus di Indonesia baru 258 orang, namun pada 31 Desember 2008 jumlah kasus di Indonesia mencapai 16.110 orang. Berdasarkan data KPA provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) jumlah masyarakat yang menderita penyakit HIV dan AIDS terus bertambah dan terakhir hingga September 2010 jumlah penderita tercatat 371 orang yang terdiri atas kasus HIV dengan jumlah mencapai 207 kasus dan 164 kasus AIDS 103 orang diantaranya telah meninggal dunia (Dirjen PPM & PL Depkes RI, 2010).

Sebagai negara berkembang Indonesia juga menghadapi permasalahan kependudukan yaitu besarnya jumlah penduduk disertai dengan tingginya pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk yang masih rendah dan persebaran penduduk yang tidak merata (BPS, 2010). Salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran adalah mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara yang lebih makmur seperti ke Malaysia, Singapura, Berunei Darussalam, Korea, Hongkong, Jepang dan Arab Saudi (ILO, 2007). Menurut data dari BNP2TKI jumlah TKI asal NTB yang bekerja di luar negeri selama 2009 tercatat 53.731 orang, atau meningkat dibanding 2008 mencapai 52.273 orang. Dari 53.731 TKI asal NTB yang bekerja di luar negeri selama tahun 2009 tercatat 32.863 orang di antaranya sebagai pekerja ladang kelapa sawit di negeri Jiran (BNP2TKI, 2009).

Pekerja migran merupakan kelompok yang rentan terhadap penularan HIV/AIDS dilihat dari mobilitas, tingkat pendidikan, kasus-kasus pelecehan seksual dan pelanggaran HAM, baik di negara tujuan maupun pada prakeberangkatan. Meski belum ada data resmi mengenai kasus HIV/AIDS pada pekerja migran yang berangkat

kedua kali atau lebih. Namun data dari KPA provinsi NTB hingga bulan September 2010 menunjukkan adanya peningkatan kasus HIV/AIDS yang disumbangkan oleh latar belakang pekerjaan CTKI/eksTKI sebanyak 19 orang (9,2%) angka ini meningkat dari tahun sebelumnya 2009 sebanyak 17 orang (8,2%) (KPA Prov. NTB, 2010).-

Upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS diselenggarakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu mengatur Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (UU RI No 39, 2004). Sasaran program ini adalah para calon pekerja migran dan pekerja migran. Keterbatasan pengetahuan dan pendidikan pekerja migran, problem yang mendasar adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan mereka mengenai PMS, HIV/AIDS, gejala-gejalanya, penyebabnya, dan cara penularannya.

Hasil survei pendahuluan dan pengamatan yang telah dilakukan di kota Mataram Provinsi NTB pada tanggal 15 Desember 2010, kegiatan PAP diselenggarakan oleh BP3TKI Mataram, metode penyampaian promosi kesehatan tentang pencegahan HIV/ADS pada saat pelaksanaan PAP pada umumnya adalah menggunakan metode ceramah tanya jawab. Waktu pelaksanaan kegiatan PAP adalah satu hari. Materi yang disampaikan berupa perjanjian kontrak kerja, perundang-undangan, pembinaan mental termasuk bahaya perdagangan narkoba, penularan HIV/AIDS dan *trafficking*. Hasil wawancara dari beberapa calon TKI yang telah mengikuti PAP mengatakan hanya sebagian yang mengerti dan ada pula yang menginginkan untuk lebih mengetahui lebih mendalam tentang HIV/AIDS, tetapi pada pemberian informasi tersebut dirasakan masih sangat kurang. Petugas PAP biasanya tidak menjelaskan secara mendalam

mengenai cara penularan HIV, bagaimana mengidentifikasi seseorang yang terinfeksi HIV/AIDS, dan sebagainya.

Dengan melihat latar belakang yang ada, maka perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang mengevaluasi penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) pada calon pekerja migran di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sugiono, 2010). Desain penelitian ini adalah eksploratif dengan rancangan penelitian studi kasus (Norman, 2009). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) pada calon pekerja migran. Populasinya adalah petugas yang melaksanakan program PAP di BP3TKI Mataram. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiono, 2010).

Ada dua jenis informan dalam penelitian ini yaitu informan utama dan informan sekunder. Informan utama adalah petugas PAP di BP3TKI Mataram (6 orang). Informan sekunder adalah sebagai triangulasi sumber yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) pada calon pekerja migran di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala PPTKIS, Kepala Dinas Kesehatan dan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTB, Pengawas PAP, Calon pekerja migran dan pekerja migran yang pulang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan *indepth interview* (wawancara mendalam), FGD (*Focus Group Discussion*), *observation*, dokumentasi dan Triangulasi (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti

menganalisa data dengan menggunakan metode *thematic content analysis*, yaitu metode yang berusaha untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola-pola yang ada berdasarkan data yang terkumpul. Untuk memperoleh data yang lebih tajam terhadap data hasil temuan di lapangan dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik analisa data kualitatif yaitu: Transkripsi data, coding data, deskripsi, horisonalisasi, unit-unit makna, deskripsi tekstual, deskripsi struktural, makna atau esensi (Kresno, 2000).

Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari petugas PAP sebagai informan utama dengan informasi dari Disnakertrans, PPTKIS, Dinas Kesehatan, KPA Provinsi NTB, Pengawas PAP, calon pekerja migran dan pekerja migran yang pulang sebagai informan sekunder. Sedangkan triangulasi metode adalah selain menggunakan metode pengumpulan data dengan *indepth interview* juga dilakukan pengumpulan data dengan FGD dan observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Input

Pengetahuan petugas

Petugas PAP telah mengetahui bahwa Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) adalah suatu pembekalan yang diberikan kepada calon pekerja migran sebelum mereka berangkat ke negara tujuan supaya calon pekerja migran mengenal bahasa dan budaya di negara yang akan dituju, kemudian calon pekerja migran tersebut mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, secara keseluruhan memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh informan utama tentang program PAP sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa program PAP. Hal ini kemungkinan disebabkan karena informan telah memiliki pengetahuan tentang program PAP yang

mereka dapatkan antara lain dari pelatihan yang telah mereka ikuti yang berkaitan dengan program PAP itu sendiri.

Pengetahuan yaitu hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Dapat disimpulkan sumber pengetahuan berasal dari penginderaan (indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba) (Notoatmojo, 2007). Pengetahuan merupakan anteseden dari perilaku yang menyediakan alasan utama atau memotivasi untuk berperilaku (Green, 2000).

Program PAP tersebut dilaksanakan oleh petugas BP3TKI Mataram dengan instruktur yang sudah dilatih bimbingan teknis sebagai instruktur PAP yang dibuktikan dengan sertifikat (Permennakertrans RI, 2009). Meskipun petugas PAP telah mengetahui tentang tujuan PAP, namun untuk pemberian materi HIV/AIDS pada calon pekerja migran petugas memiliki kemampuan yang terbatas. Hal ini dilihat dari latar belakang pendidikan instruktur, belum adanya sertifikat pelatihan bimbingan teknis PAP dan persiapan memberi materi hanya berbekal dari membaca buku pegangan instruktur dan belajar dari instruktur senior.

Sikap petugas

Sikap yang ditunjukkan oleh petugas PAP bahwa mereka memang peduli dengan calon pekerja migran, petugas harus memberikan pelayanan dan perlindungan bagi calon pekerja migran. Perlindungan terhadap calon pekerja migran yang berkaitan dengan informasi HIV/AIDS dapat diberikan pada pelaksanaan PAP. Dengan demikian instruktur yang mengisi PAP semua menyampaikan materi HIV/AIDS di setiap akhir sesi pembahasan materinya, meskipun materi yang disampaikan bukan pokok bahasan bahaya perdagangan narkoba, obat-obat terlarang, kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Hal ini kemungkinan disebabkan karena informan telah memiliki sikap positif. Sikap ini termasuk dalam faktor pemudah yaitu faktor yang mendahului perilaku dan berkaitan langsung dengan

rasionalisasi serta motivasi individu atau kelompok untuk melaksanakan PAP (Green, 2000).

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, sikap yang ditampilkan oleh informan/instruktur dalam memberikan PAP pada calon pekerja migran adalah mereka menyampaikan informasi HIV/AIDS diberikan secara umum bahkan informasi HIV/AIDS diselipkan pada materi teknis yang lain sehingga informasi HIV/AIDS yang diterima calon pekerja migran hanya sebagai pelengkap saja. Materi HIV/AIDS berbeda dengan isi modul pegangan instruktur bahwa di modul tersebut dibahas secara rinci tentang informasi HIV/AIDS pada materi PAP. Informan menganggap bahwa pekerja migran formal yang berkerja di ladang Malaysia berada pada lokasi yang jauh dari keramaian kota sehingga tidak perlu dikhawatirkan berisiko terhadap penularan HIV/AIDS. Dengan kasus perilaku seksual pekerja migran seperti di ladang-ladang Malaysia ini sangat dimungkinkan sekali dapat terjadi penularan PMS sebagai pintu masuk penularan HIV/AIDS.

Ketersediaan sarana dan prasarana

BP3TKI Mataram menyewa tempat pelaksanaan PAP dengan biaya yang sudah dianggarkan. Tempat yang digunakan untuk pelaksanaan PAP adalah Hotel Orindo di Sweta, Wisma Mitra di Pagesangan dan Balai Latihan Transmigrasi di Selagalas. Kelas yang disewa untuk pelaksanaan PAP dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk peserta, meja dan kursi instruktur, papan tulis, kipas angin, dan alat pengeras suara. Semua tempat PAP yang disewa tidak dilengkapi alat bantu mengajar seperti OHP, laptop dan LCD. BP3TKI Mataram hanya memiliki laptop dan LCD sebanyak 1 buah. Laptop dan LCD yang dimiliki oleh BP3TKI Mataram jarang digunakan untuk memberikan materi PAP dan lebih sering digunakan untuk perekrutan calon pekerja migran yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi NTB.

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan

PAP, bahwa seluruh informan/instruktur tidak ada yang menggunakan alat bantu pengajaran pada pelaksanaan PAP. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat para instruktur tidak optimal dalam memberikan materi PAP, mereka hanya mengandalkan metode ceramah yang selama ini digunakan pada pemberian materi PAP pada calon pekerja migran.

Dalam hal ini berkaitan dengan faktor pendukung (*enabling factors*) yaitu kemampuan atau sumber daya individu atau masyarakat yang dapat membantu atau memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan perilaku kesehatan tertentu dalam hal ini proses pelaksanaan PAP. Faktor pendukung dapat dipandang sebagai wahana atau justru penghambat perilaku yang bersumber dari kekuatan atau sistem sosial, misalnya adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan PAP (Green, 2000). BP3TKI Mataram belum siap secara penuh sebagai penyelenggara PAP di lihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Kondisi sarana dan prasarana pada kelas PAP di Provinsi NTB masih jauh dari standar sarana dan prasarana kelas yang ideal.

Komitmen pimpinan

Kepala BP3TKI Mataram mempunyai komitmen bahwa BP3TKI sebagai unit pelaksana teknis dari BNP2TKI yang ada di daerah bertekat untuk terus melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap pekerja migran yaitu dengan memfasilitasi dan mendukung adanya pelaksanaan PAP yang ditujukan kepada calon pekerja migran sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Selain memberikan pelayanan dan perlindungan pada calon pekerja migran, BP3TKI juga memberikan kelancaran pelaksanaan PAP dan KTKLN, yaitu dengan berusaha melengkapi sarana dan prasarana seperti menambah perangkat-perangkat untuk proses pembuatan KTKLN, pada tahun 2010 telah mengusulkan alat media pengajaran PAP ke pemerintah pusat di Jakarta dan menambahkan jumlah kelas PAP,

menjadi 3 tempat yang masing-masing tempat terdiri dari 2 kelas, sehingga jumlah kelas PAP menjadi 6 kelas.

Komitmen pimpinan merupakan faktor pemungkin/pendukung (*enabling factor*) digambarkan sebagai faktor-faktor yang memungkinkan (membuat lebih mudah) individu atau populasi untuk merubah perilaku atau lingkungan mereka dalam pelaksanaan PAP (Green, 2000). Komitmen pimpinan ini sesuai dengan pasal 24 Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2006 tentang BNP2TKI bahwa BP3TKI mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PP RI No 81, 2006).

Kebijakan

Kebijakan yang mendasari pelaksanaan PAP ini adalah Undang-undang R.I. No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi dijelaskan bahwa penyelenggaraan PAP dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mengikutsertakan instansi lain yang terkait. Di tingkat provinsi penyelenggaraan PAP dapat dilimpahkan kepada gubernur dengan mengikut sertakan instansi lain terkait dan dinas kabupaten/kota. Penanggungjawab penyelenggaraan PAP adalah BNP2TKI. PAP dilaksanakan oleh BP3TKI, dalam melaksanakan PAP, BP3TKI dapat mengikutsertakan instansi terkait. Dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi bahwa PAP dilaksanakan selama 2 (dua) hari atau 20 (dua puluh) jam pelajaran.

Kebijakan BNP2TKI tentang pembekalan materi HIV/AIDS pada calon pekerja migran yaitu dapat diberikan pada saat pelatihan BLK, uji kompetensi dan pelaksanaan PAP. Di Provinsi

NTB diberikan tugas untuk memproses calon pekerja migran tujuan penempatan negara Malaysia yang merupakan calon pekerja migran formal, pembekalan materi HIV/AIDS diberikan pada saat pelaksanaan PAP.

Kebijakan adalah seperangkat peraturan yang digunakan sebagai petunjuk untuk melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini berkaitan dengan faktor pendukung (*enabling factors*) yaitu faktor antesenden terhadap perilaku yang memungkinkan suatu motivasi atau aspirasi terlaksana. Faktor ini terwujud dalam lingkungan fisik, yaitu adanya aturan atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan PAP (Green, 2000).

Materi khusus HIV/AIDS tidak tertulis dengan jelas. Hal ini berbeda dengan yang tertulis pada kebijakan dan buku pegangan instruktur yang ada. Para instruktur yang mengampu materi HIV/AIDS melihat jadwal yang dibuat BP3TKI Mataram lebih mengutamakan pada bahaya perdagangan narkoba, obat-obatan terlarang pada pemberian PAP pada calon pekerja migran. Untuk materi HIV/AIDS diberikan hanya secara umum. Dengan melihat kondisi pelaksanaan PAP seperti di atas bahwa kebijakan tentang pembekalan materi HIV/AIDS pada calon pekerja migran formal tujuan penempatan negara Malaysia yang dapat diberikan pada pelaksanaan PAP seperti di Provinsi NTB belum dilaksanakan secara maksimal.

Budgeting

Sumber dana penyelenggaraan PAP sejak tahun 2006 sampai sekarang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Sistem pengelolaannya dilakukan oleh BP3TKI Mataram. Sebagai unit pelaksana teknis di daerah BP3TKI Mataram membuat daftar usulan dana kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah BNP2TKI, dana yang diusulkan berdasarkan target jumlah TKI yang dibebankan untuk masing-masing provinsi. Pembiayaan operasional pelaksanaan PAP sejak tahun 2006 di biayai oleh pemerintah yang dibebankan pada DIPA BP3TKI Mataram, yang sebelumnya

pelaksanaan PAP dibiayai oleh PPTKIS sehingga calon pekerja migran tidak dipungut biaya untuk mengikuti pelaksanaan PAP.

Berkaitan dengan faktor pendukung (*enabling factors*) yaitu digambarkan sebagai faktor yang memungkinkan individu atau populasi untuk merubah perilaku atau lingkungan mereka. Faktor pemungkin yang memudahkan untuk terjadinya suatu perilaku disini meliputi ketersediaan sumber daya yaitu adanya biaya yang mendukung pelaksanaan PAP (Green, 2000).

Komitmen dan dukungan instansi terkait

Dalam penyelenggaraan PAP untuk pemberi materi teknis seperti Perjanjian Kerja, BP3TKI Mataram telah bekerjasama dan melibatkan instruktur dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Mulai tahun 2006 BP3TKI Mataram tidak melibatkan lagi instruktur dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk mengisi materi HIV/AIDS dengan alasan BP3TKI Mataram sudah menyiapkan instruktur sendiri yang telah dilatih bimbingan teknis PAP. Selain alasan itu pelaksanaan PAP di Mataram ditujukan pada calon pekerja migran tujuan penempatan negara Malaysia sebagai pekerja migran formal hanya diberikan secara umum.

Dinas Kesehatan Provinsi NTB sudah mempercayakan dan memberi dukungan kepada BP3TKI Mataram yang telah menyediakan sendiri instruktur yang mengampu materi HIV/AIDS yang telah dilatih bimbingan teknis PAP.

Faktor-faktor yang menguatkan (*reinforcing factor*) yang termasuk didalamnya adalah peranan orang lain termasuk teman sebaya, majikan, tokoh masyarakat, orang tua akan mempengaruhi secara langsung terhadap perilaku seseorang (Green, 2000). Tidak adanya keterlibatan dari Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS hal ini disebabkan oleh adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dimana pemberi materi/ Instruktur PAP ditetapkan oleh Kepala

BNP2TKI berupa Surat Keputusan dari Deputi Penempatan (PP RI No 81, 2006).

Evaluasi Proses Perencanaan

Program pembekalan materi HIV/AIDS pada calon pekerja migran adalah kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam salah satu materi PAP yang harus diikuti oleh calon pekerja migran sebelum mereka berangkat ke negara tujuan penempatan. Materi HIV/AIDS merupakan materi penunjang yang tergabung dalam pokok bahasan Bahaya Perdagangan Narkoba, Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS, dan *trafficking*. Tujuan dari pelaksanaan PAP dijawab oleh informan untuk memberikan pembekalan atau informasi kepada calon pekerja migran yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon pekerja migran mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

Dari apa yang dikemukakan oleh informan utama yang berkaitan dengan perencanaan tersebut sesuai dengan rumusan, bahwa perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Wiyono, 1997).

Perencanaan dapat menggambarkan kegiatan program secara keseluruhan dan memusatkan perhatian pada sasaran. Pada persiapan pelaksanaan PAP tidak pernah dilakukan perencanaan jadwal. Jadwal dibuat secara harian tergantung dari surat permohonan dari PPTKIS yang masuk ke BP3TKI Mataram. Jadwal dibuat pada pagi hari sebelum PAP dilaksanakan kemudian surat permohonan mengajar beserta lampiran jadwal dikirim kepada masing-masing instruktur. Hal ini kemungkinan karena pelaksanaan PAP sudah merupakan aktivitas yang rutin yang biasa diselenggarakan oleh BP3TKI Mataram sehingga dalam pengaturan jadwal PAP tinggal menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada.

Pengorganisasian

Pelaksanaan PAP dijadwalkan apabila ada permintaan dari PPTKIS. Pelaksanaan PAP sudah merupakan aktivitas rutin yang biasa diselenggarakan oleh BP3TKI Mataram. Jadwal dibuat pada pagi hari sebelum PAP dilaksanakan kemudian surat permohonan mengajar beserta lampiran jadwal dikirim kepada masing-masing instruktur. Jadwal PAP dibuat dalam bentuk jadwal harian. Pemateri dengan pokok bahasan Bahaya Perdagangan Narkoba, Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS dan perdagangan manusia sebanyak 3 orang instruktur yang sudah dilatih dan 2 orang yang belum dilatih bimbingan teknis PAP. Untuk mengatasi kekurangan instruktur BP3TKI Mataram menyiasatinya dengan menjadwalkan 2 kali kepada salah satu instruktur untuk materi yang sama. Instruktur yang kompeten dalam penguasaan materi tentu sangat dibutuhkan, hal ini sangat berpengaruh dalam penyampaian pesan tentang HIV/AIDS yang akan diterima oleh calon pekerja migran.

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan perilaku yang efektif antara masing-masing orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan diri melaksanakan tugas-tugas terpilih di dalam kondisi lingkungan yang ada, untuk mencapai tujuan dan sasaran (Wiyono, 1997).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh informan utama tentang pengorganisasian tersebut. Hal ini telah memuat dari unsur organisasi antara lain memuat tentang pembagian kerja dan dan kerjasama satuan kerja dan lingkungan yang mendukung.

Pelaksanaan

BP3TKI Mataram membuat jadwal pelaksanaan PAP dan dilaksanakan pada hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, kecuali hari Jum'at tidak ada penjadwalan kelas PAP. Hal ini dikarenakan apabila pelaksanaan PAP dilakukan pada hari Jum'at dan hari Sabtu harus dilakukan pembuatan KTKLN sedangkan

kantor BP3TKI Mataram hanya 5 hari kerja dan pada hari Sabtu libur. PPTKIS yang bersedia membiayai sendiri penginapan untuk calon pekerja migran untuk dilakukan foto pada hari Senin minggu berikutnya, maka hari Jum'at dapat dilakukan penjadwalan kelas PAP. Penjadwalan PAP dibuat berdasarkan permintaan dari PPTKIS.

Jadwal PAP dibuat dalam bentuk jadwal harian. Pelaksanaan PAP dimulai pukul 13.00 sampai dengan 20.30 WITA. Dengan 4 (empat) pokok bahasan masing-masing di alokasikan 2 (dua) jam pelajaran sehingga total keseluruhan sebanyak 8 (delapan) jam pelajaran. Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PAP adalah 1 (satu) hari. Menurut informan dengan waktu 1 (satu) hari pelaksanaan PAP sudah mencukupi waktu yang dibutuhkan.

Dari hasil observasi diperoleh bahwa mulai pelaksanaan PAP tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, waktu yang digunakan oleh masing-masing instruktur durasinya tidak sampai 2 jam dari waktu yang disediakan, mereka hanya mengisi jam pelajaran antara 30 menit sampai dengan 60 menit. Sehingga pelaksanaan PAP tidak maksimal dan berakhir pada pukul 18.00 WITA. Begitu juga untuk materi HIV/AIDS sudah termasuk di dalam materi Bahaya perdagangan narkoba, obat terlarang, pola hidup sehat, bahaya perdagangan manusia. Materi HIV/AIDS tidak dibahas secara spesifik, sering juga dalam memberikan materi teknis seperti Perundang-undangan, Perjanjian kontrak kerja dan Pembinaan mental kepribadian juga diselipkan tentang materi HIV/AIDS.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang penyelenggaraan akhir pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang menyebutkan bahwa PAP dilaksanakan selama 2 (dua) hari atau 20 (dua puluh) jam pelajaran (Permen RI Nomor PER.17/MEN/VIII/2009). Banyaknya jumlah peserta PAP yang melebihi ketentuan ini

disebabkan oleh permintaan tenaga kerja dari Malaysia sebagai pengguna jasa pekerja migran ini meningkat karena musim panen kelapa sawit sudah datang sehingga *calling visa* turun dalam waktu bersamaan.

Dari hasil observasi pelaksanaan PAP diperoleh jumlah peserta yang hadir sebanyak 50 sampai dengan 75 orang per kelas. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyebutkan bahwa jumlah peserta PAP tiap kelompok/kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang.

Penilaian/Evaluasi

Tidak ada evaluasi pada pelaksanaan PAP maupun instruktur PAP oleh pihak manapun. Pelaksanaan PAP sudah bertahun-tahun diselenggarakan sehingga BP3TKI Mataram sudah dipercaya memberikan PAP pada calon pekerja migran. Pimpinan BP3TKI Mataram sendiri belum pernah melakukan evaluasi terhadap penampilan kelas PAP, evaluasi dilaksanakan secara keseluruhan pada saat rapat hanya berupa himbuan-himbuan kepada Instruktur untuk terus melakukan peningkatan-peningkatan dalam memberikan materi PAP.

Penilaian adalah suatu cara yang sistematis untuk mempelajari berdasarkan pengalaman dan mempergunakan pelajaran yang dipelajari memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan serta meningkatkan perencanaan yang lebih baik dengan seleksi yang seksama untuk kegiatan masa datang (Wiyono, 2010).

Tidak adanya evaluasi pengetahuan dan sikap calon pekerja migran khususnya tentang materi HIV/AIDS pada saat PAP, BP3TKI Mataram tidak dapat melihat keberhasilan yang dicapai terkait pengetahuan dan sikap calon pekerja migran.

Evaluasi Output

Pelaksanaan PAP belum maksimal dianggap hanya sekedar pemantapan dan sebagian besar calon pekerja migran umumnya sudah pernah pergi ke Malaysia, sehingga Instruktur

menganggap para calon pekerja migran sudah mengerti tentang materi-materi yang disampaikan pada saat PAP.

Pengetahuan calon pekerja migran tentang HIV/AIDS sangat terbatas. Sebagian besar informan mengatakan bahwa penyakit HIV/AIDS tidak mengetahuinya dan tidak mengerti. Pengetahuan mereka hanya sebatas bahwa penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit menular dan mematikan karena sampai saat ini belum ada obatnya.

Sikap Calon Pekerja Migran sebagian kecil informan calon pekerja migran mengatakan bahwa supaya tidak tertular HIV/AIDS berusaha menjauhi pergaulan bebas, berdzikir mengingat kepada Tuhan, mengingat istri dan anak di kampung. Sebagian besar informan mengatakan bahwa apabila tidak dapat menahan untuk melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks mereka akan menggunakan kondom.

Evaluasi Konten PAP

Pokok bahasan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS sudah termasuk di dalam materi Bahaya Perdagangan Narkoba, Obat Terlarang, Pola Hidup Sehat, Bahaya Perdagangan Manusia. Materi HIV/AIDS diambil dari modul pegangan instruktur yang diperoleh dari pelatihan bimbingan teknis PAP di Jakarta.

Metode yang digunakan hanya metode ceramah dan tanya jawab dengan menggunakan pengeras suara. Selebihnya metode PAP yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI seperti diskusi dan simulasi tidak pernah dicoba untuk digunakan dalam pembekalan PAP di Provinsi NTB. Instruktur menganggap tidak ada kompetensi yang harus disimulasikan. Penyampaian materi yang hanya dengan kata-kata sangat kurang efektif atau intensitasnya paling rendah (Mubarak, 2007). Tidak adanya media yang digunakan dalam Pemberian Materi HIV/AIDS pada pelaksanaan PAP alat peraga/media baik media elektronik maupun media cetak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PAP di Provinsi NTB tidak sesuai dengan konsep promosi. Seseorang atau masyarakat di dalam proses pendidikan dapat memperoleh pengalaman/pengetahuan melalui berbagai macam alat bantu pendidikan. Pemberian materi dengan kata-kata atau disebut ceramah sangat kurang efektif atau intensitasnya paling rendah. Jelas bahwa penggunaan alat peraga adalah salah satu prinsip proses pendidikan. Seperti yang dilaporkan Elgar Dale pada umumnya pembelajaran hanya 20% ditangkap dari apa yang mereka dengar (Heri, 2009).

SIMPULAN

Penyelenggaraan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk calon pekerja migran formal tujuan penempatan negara Malaysia, sehingga peluang pemberian informasi tentang HIV/AIDS disampaikan pada saat pelaksanaan PAP. Program PAP dilaksanakan belum secara maksimal hanya sekedar formalitas yang kualitasnya masih kurang. Pembekalan materi HIV/AIDS pada calon pekerja migran formal oleh petugas penyelenggara PAP masih dianggap belum begitu penting. Dimana materi HIV/AIDS diberikan hanya secara umum yang tergabung dalam materi PAP yang lain. Penyampaian materi PAP hanya menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media pengajaran yang mengakibatkan pengetahuan calon pekerja migran tentang HIV/AIDS sangat terbatas. Kurangnya kerjasama lintas sektor dengan KPA dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam pembekalan materi HIV/AIDS pada calon pekerja migran mengakibatkan terbatasnya informasi yang diberikan kepada calon pekerja migran karena hanya sebatas pengetahuan dari petugas PAP tentang HIV/AIDS yang terbatas.

KEPUSTAKAAN

BNP2TKI. 2009. Laporan Penempatan TKI yang Bekerja di Luar Negeri. Mataram.

- BPS. 2010. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010. Jakarta : Berita Resmi Statistik.
- Depkes RI. 2009. Direktur Jenderal PP&PL. Pedoman Nasional Manajemen Program HIV dan AIDS. Jakarta.
- Green, L. 2000. Health Promotion Planning : An Educational and Environmental Approach. Second Edition. Mountain View- Toronto-London : Mayfield Publishing company.
- Heri, D.J. dkk, 2009. Promosi Kesehatan. Jakarta : EGC.
- ILO. 2007. Buletin Pekerja Migran dan HIV/ AIDS. Jakarta.
- KPA Provinsi NTB. 2010. Laporan Situasi HIV dan AIDS Provinsi NTB s/d September 2010.
- Kresno, S. dkk, 2000. Aplikasi Metode Kualitatif dalam Penelitian Kesehatan. Jakarta : FKM Universitas Indonesia.
- Moleong, L. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, W. dkk. 2007. Promosi Kesehatan. Jakarta : Graha Ilmu.
- Norman KD, 2009. Handbook Of Qualitative Research. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka Cipta.
- Permennakertrans RI No. PER.17/MEN/VIII/2009. 2009. Penyelenggaraan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Jakarta : Permennakertrans
- Peraturan Presiden RI. No 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicetak ulang oleh BP3TKI Semarang
- Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Wiyono, D. 1997. Manajemen Kepemimpinan dan Organisasi Kesehatan. Surabaya : Airlangga University Press.